



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 23 Januari 2023/Periodik - 2022)

**BIDANG** : BUMN/BUMD  
**LEMBAGA** : PUPUK INDONESIA GROUP  
**UNIT KERJA** : PT PUPUK INDONESIA (PERSERO)

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **BUDI MULIA UTAMA HASIBUAN**
2. Jabatan : **SENIOR VICE PRESIDENT**
3. NHK : **184040**

**II. DATA HARTA****A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 9.500.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 119 m2/123 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HIBAH TANPA AKTA Rp. 2.000.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m2/89 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HIBAH TANPA AKTA Rp. 2.500.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/300 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**

Rp. 660.000.000

1. MOBIL, MERCY C 250 Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 260.000.000
2. MOBIL, HONDA HRV Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 160.000.000
3. MOBIL, HYUNDAI CRETA Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 240.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA**

Rp. 365.800.000

**D. SURAT BERHARGA**

Rp. ----

**E. KAS DAN SETARA KAS**

Rp. 233.413.043

**F. HARTA LAINNYA**

Rp. ----

**Sub Total**

Rp. 10.759.213.043

**III. HUTANG**

Rp. 394.424.266

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)**

Rp. 10.364.788.777

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.